



seri literasi digital

# demokrasi damai era digital



penerbit: siberkreasi

Seri Literasi Digital  
**DEMOKRASI DAMAI ERA DIGITAL**

**Editor**

Wicaksono

**Asisten Editor**

Adya Nisita  
Alvidha Septianingrum  
Dedy Permadi

**Penulis**

Ade Irma Sukmawati	Made Dwi Anjani
Aldinshah Vijawabwana	Marvin F. Laurens
Astri Dwi	Muna Madrah
Adya Nisita	M. Said Hasibuan
Cahya Suryani	Ni Ras Amanda
Debby Dwi Elsha	Novi Kurnia
Diena Haryana	Olivia Lewi
Donny BU	Puji Rianto
Edi Santoso	Radityo Widyatmojo
Ellen Yasak	Ratri Rizki Kusumalestari
Firly Annisa	Rita Gani
Frida Kusumastuti	Rita Nurlita Setia
Gilang Desti Parahita	Unggul Sagena
Gilang Jiwana Adikara	Wisnu Martha
Ignatius Aryono Putranto	Yohanes Widodo
Indriyatno Banyumurti	Zainuddin Muda
Lintang Ratri Rahmiaji	Amy Kamila

**Desain & Tata Letak**

Adityo Rachmanto

**Gerakan Nasional Literasi Digital**  
**Siberkreasi**  
**Jakarta**  
**2019**

Diterbitkan oleh **Siberkreasi**

Cetakan I, 2019  
ii + 239 halaman; 13 cm x 19 cm  
ISBN: 978-623-90693-0-8

Buku ini juga dapat diunduh bebas di [www.literasidigital.id](http://www.literasidigital.id)

ISBN 978-623-90693-0-8



9 786239 069308

# *Narasi Damai Jurnalis Warga*

*Penulis: Edi Santoso (Japelidi)*

Suharti tak pernah membayangkan akan menjadi jurnalis. Dia hanya lulusan SMP, tinggal di sebuah desa di pinggiran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sampai kemudian datang seorang aktivis yang memotivasi Suharti untuk bergabung dalam komunitas jurnalis warga. Dengan penuh kesabaran, dia belajar menulis, mengirimkan berita, hingga bisa tayang di sebuah portal berita lokal (suarapaguyangan.com).

Suharti kini jauh lebih percaya diri. Tak semata yakin bisa menulis berita, tetapi juga percaya bahwa jurnalisisme adalah jalan pengabdian. Sebagai jurnalis warga, tentu saja, dia tak dibayar. Meski sepenuhnya aktivitas itu bersifat sukarela, tapi dia bahagia karena bisa membantu sesama. Yani, tetangganya, adalah orang yang merasakan jasa baik Suharti.

Gadis yang mulai menginjak dewasa itu mengidap polio. Kemiskinan orang tuanya tak memungkinkan Yani punya kursi roda. Suharti trenyuh, kemudian menuliskan kisah Yani menjadi cerita human interest. Setelah dimuat di suarapaguyangan.com, banyak pembaca yang berempati. Para donatur pun berdatangan. Kini, Yani tak hanya punya kursi roda, rumah orang tuanya yang reot pun tergantikan oleh rumah yang lebih layak huni.

Di Kabupaten Brebes, geliat jurnalisisme warga tak lepas dari kepeloporan Bahrul Ulum, pria muda yang kenyang asam garam di dunia aktivisme sosial. Alumnus Universitas Jenderal Soedirman inilah yang pertama kali merintis terbentuknya komunitas jurnalis warga di Brebes, lewat grup Facebook

Celoteh Brebes Membangun (CBM). Bahrul Ulum meyakini, media sosial membawa peluang yang besar untuk mendorong partisipasi masyarakat, melalui kemampuannya menciptakan opini publik.

Bahrul Ulum mengoptimalkan grup Facebook tersebut dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Grup ini mempunyai lebih dari 21 ribu anggota. Hampir semua pejabat Pemerintah Daerah Brebes tergabung dalam grup ini, baik bupati ataupun jajaran Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD).

Dari dunia maya, berbagai aksi sosial menjadi nyata. Bagi Bahrul, media sosial bisa menjadi ruang kritik. "Kami mengkritik dengan memberikan solusi. Kritik yang membangun," ujarnya. Demikian Bahrul menunjukkan perspektif konstruktifnya sebagai warganet. Salah satu contoh aksi besarnya melalui media sosial, dia menggerakkan aksi penanaman mangrove di lahan seluas 25 hektare di Pantai Brebes. Di bidang pendidikan, bersama komunitasnya Bahrul tak pantang lelah untuk terus mengembalikan anak putus sekolah ke ruang kelas. Di bidang lingkungan, Bahrul dan kawan-kawan turut serta dalam program pembuatan jamban murah bagi warga.

Suharti dan Bahrul adalah dua dari beberapa jurnalis warga di Kabupaten Brebes yang mengabdikan diri di jalur sunyi. Internet dan media sosial, bagi mereka, adalah peluang untuk menggali kolaborasi, lebih dari sekadar tempat unjuk eksistensi. Sosok mereka seperti antitesis warganet yang hanya membuat gaduh dunia maya dengan berbagai sampah informasi, baik berupa disinformasi (hoaks, fake news) ataupun ujaran kebencian (hate speech).

Kehadiran internet pada awalnya memang membawa optimisme, bahwa demokratisasi media (massa) semakin nyata. Dengan internet, siapa pun bisa menjadi produsen dan penyebar informasi. Era dominasi pemilik modal dalam bisnis informasi perlahan luruh. Ide jurnalisisme warga semakin menemukan bentuknya, terutama sejak kemunculan media sosial. Akses internet yang makin mudah dan murah, membuat orang semakin terkoneksi. Ide kolaborasi dalam berbagi informasi sungguh mudah terealisasi.

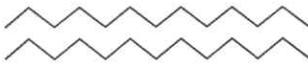
Namun, jurnalisisme lebih dari sekadar memproduksi atau mereproduksi dan membagi informasi. Jurnalisme adalah sebuah laku moral, kata wartawan senior Goenawan Muhamad. Dalam studi jurnalisme, jurnalis itu 'defining agency', karena di tangan jurnalislah fakta dicari, disusun, dan diberi makna. Jurnalis memberikan perspektif terhadap realitas. Tanpa landasan moral, praktik produksi dan distribusi informasi hanya akan membawa masalah baru, yakni maraknya konten bohong dan narasi penuh negasi.

Harapan akan demokratisasi komunikasi massa seperti pupus, ketika yang marak di internet adalah praktik disinformasi: fakta dan fiksi sulit dibedakan. Dalam istilah Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2010), teknologi telah membantu kaburnya batas antara kenyataan dan rekaan, sehingga porsi tanggung jawab untuk tahu yang benar dan yang tidak, kini berada di tangan kita sebagai individu.

Praktik disinformasi ini yang kemudian memperkuat fenomena post-truth, ketika orang lebih diarahkan oleh prasangka ketimbang fakta. Saking populernya, Oxford Dictionaries menyebut 'post-truth' sebagai word of the year pada tahun 2016. Singkatnya, di era digital ini, masalah kita adalah 'krisis kepercayaan'. Ini terjadi, justru di saat orang berlimpah informasi. Jika dulu masalah manusia adalah minimnya kabar, kini yang terjadi justru sebaliknya. Kita berlimpah informasi, tetapi krisis kepercayaan.

### **Jurnalisme warga**

Menurut Nip (2006), jurnalisme warga merujuk pada aktivitas produksi dan publikasi berita tanpa campur tangan atau partisipasi jurnalis profesional atau media yang sudah mapan. Nah et.al (2017) juga menggambarkan jurnalis warga sebagai jurnalis amatir atau jurnalis akar rumput (*grassroots journalist*). Lebih lanjut dia mengatakan, teknologi komunikasi baru telah meningkatkan peran warga, mengarahkan orang untuk menjadi jurnalis warga, misalnya dengan menjadi *blogger*, *wikimedian*, jurnalis siber. Sejatinya, kata Rutigliano (2007), blogging merupakan awal dari berita daring (online) yang berorientasi pada warga. Senada dengan itu, Ryfe dan Mensing (2010) mendeskripsikan jurnalisme warga sebagai '*blogging, opensource*



*newsgathering, wikis, informational "mash-ups" and citizen journalism sites'.*

Jurnalisme warga dipahami sebagai bentuk reportase yang melengkapi, bukan mengganti, liputan berita media arus utama (Jurrat, 2011). Dalam banyak kasus, media warga berposisi sebagai bentuk resistensi atas narasi hegemonik media mainstream (Rodríguez, 2011). Jurnalisme warga bisa berperan sebagai jurnalisme alternatif dan independen, sebagaimana disampaikan Forde (2009) ataupun Atton dan Hamilton (2008), yang menggambarkan jurnalisme alternatif pada realitas di mana jurnalis komunitas, baik yang terlatih atau tidak, melaporkan suara-suara yang selama ini tak terwakili di media arus utama.

Praktik jurnalisme warga semakin signifikan seiring dengan pertumbuhan internet yang memberikan peluang akses media lebih luas pada masyarakat. Realitas ini antara lain ditandai oleh tren 'user generated content' (Chung, et al, 2017), di mana warga secara sukarela memproduksi dan membagi informasi. Di sini, jurnalis warga diwakili para blogger atau para warganet secara umum yang memproduksi atau mereproduksi pesan melalui media sosial.

Salah satu sisi strategis jurnalisme warga adalah pada kemampuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Beberapa riset mengonfirmasi hal ini, antara lain yang ditulis Mody dan Bella (2011), bahwa proyek jurnalisme warga telah mendorong partisipasi sipil dalam isu kemanusiaan di Darfur. Begitu juga dengan penelitian Nah et al (2017) yang menegaskan bahwa praktik jurnalisme warga memiliki efek langsung dalam mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan jiwa kerelawanan dalam berbagai organisasi sosial.

### **Narasi Damai**

Sebagai sebuah praktik, jurnalisme warga memang punya banyak wajah. Ada yang berjalan secara individual, ada yang berjejaring dalam komunitas seperti di Kabupaten Brebes. Kelebihan mereka yang berjejaring, ada upaya peningkatan kapasitas, termasuk penanaman komitmen etis dalam berbagi informasi. Jika prinsip-prinsip jurnalisme

diterapkan, maka tidak mungkin ada hoaks. Karena sudah menjadi nilai dasar dalam jurnalisme, setiap berita harus berangkat dari fakta. Karena alasan ini pula, istilah 'fake news' banyak dikiritik, karena mengandung paradoks. Berita tak mungkin palsu. Kalau ada yang palsu, maka tak bisa disebut sebagai berita. Begitu logikanya.

Visi dalam jurnalisme warga menjadi penting. Ini menjelaskan apa yang menjadi muara dari segala aktivitas jurnalisme mereka. Seperti di Brebes, Bahrul Ulum menegaskan visinya adalah untuk 'memberdayakan masyarakat', sesuai dengan nama komunitasnya: Celoteh Brebes Membangun. "Saya pakai nama 'celoteh', karena ini (pada dasarnya adalah) perbincangan. (Dan kami) pakai nama 'membangun', karena tujuannya memang membangun, memberdayakan. Jadi, kami mengkritik dengan memberi solusi," kata dia.

Dalam visi pemberdayaan seperti itu, satu aspek yang paling dihindari para jurnalis warga, (mestinya) adalah narasi 'perang' terhadap liyan. Karena, pemberdayaan berarti menyatukan, bukan menceraiberaikan. Dengan kata lain, memberdayakan berarti pula membawa visi atau narasi damai. Kohesi, bukan segregasi sosial.

Kita memang tak bisa menutup kenyataan, aspek 'individuasi' dalam jurnalisme warga rawan penyimpangan. Sementara pemahaman etis kita rendah, tren menjadi otonom dalam berjejaring dan membagi informasi terus menguat. Akhirnya, yang kita lihat, dalam ruang publik dunia maya ini, penuh dengan konten yang jauh dari etika. Pesan kebencian (hate speech) misalnya, kini semakin meningkat jumlahnya di ranah online.

Di Inggris, jumlah orang yang ditahan karena kejahatan ucapan di internet meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 tercatat 625 orang ditahan dalam kasus ini, yang meningkat menjadi 857 orang pada tahun 2015. Jadi, ada peningkatan 37 persen dalam rentang lima tahun (seperti dikutip Leam Deacon dari Freedom of Information Request yang dibuat oleh Metropolitan Police). BBC pernah menyebut tahun 2015 sebagai 'The Year that Angry Won The Internet', berdasarkan data yang menunjukkan tingginya

pesan kebencian di internet. Sebagai contoh, berdasarkan analisis Demos, rata-rata 480 ribu pesan berisi kebencian ras di tweet-kan melalui Twitter tiap bulan pada tahun 2015. Bandingkan dengan angka 10 ribu pada tiga tahun sebelumnya. Dalam pandangan UN Human Rights Council Special Rapporteur on Minority Issues (HRC, 2015), pesan kebencian di ranah online menjadi tantangan baru.

Sementara statistik yang memberikan gambaran global tentang fenomena ini belum tersedia, platform jejaring sosial dan organisasi yang diciptakan untuk memerangi kebencian telah menunjukkan bahwa pesan kebencian yang disebar secara online semakin umum dan telah menimbulkan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut HateBase-aplikasi berbasis web yang mengumpulkan contoh pesan kebencian online di seluruh dunia, sebagian besar kasus kebencian atas individu terjadi berdasarkan etnis dan kebangsaan. Hasutan untuk kebencian yang berfokus pada agama dan kelas juga telah meningkat.

Di Indonesia memang belum ada data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan pesan kebencian di ranah online. Namun, beberapa peristiwa terakhir menunjukkan dampak mengerikan dari beredarnya pesan kebencian, misalnya dalam kasus kerusuhan Tanjung Balai. Kejadian yang terjadi pada Juli 2016 ini berawal dari kesalahpahaman beberapa orang, yang kemudian diunggah dan disebarluaskan melalui media sosial. Orang yang menerima pesan tanpa memahami persoalan sesungguhnya kemudian tersulut amarah, dan turut menyebarkan pesan itu. Pesan yang sambung menyambung itu kemudian memunculkan kemarahan massa, hingga mengakibatkan perusakan sebuah tempat ibadah. Sebelum kasus ini, pesan kebencian juga marak terutama pada saat hajatan politik seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Pilpres 2014 tercatat sebagai kontestasi yang menyedot perhatian besar para netizen. Dua kelompok pendukung saling berhadapan dan sama-sama 'militan'. Dari sinilah kemudian populer istilah 'hater', karena memang pesan-pesan kebencian diproduksi dan direproduksi secara massal oleh masing-masing kubu untuk menegasikan kelompok lainnya. Suasana ini tak serta merta meredup seiring berlalunya pilpres. Pada saat menjelang pilkada DKI 2017 misalnya, suasana pilpres 2014 kembali

terjadi. Masing-masing kelompok saling serang dengan pesan-pesan kebencian di ranah online. Dan kini, menjelang pemilu 2019, kecenderungan serupa juga terulang.

### **Regulasi dan Literasi**

Dari praktik jurnalisme warga yang bervisi damai, kita mencatat bahwa hal yang paling penting bagi para netizen adalah kecerdasan bermedia (literasi media). Netizen tak hanya bisa mengakses dan menggunakan media, tetapi juga memahami dampak konten media bagi individu ataupun kehidupan sosial. Mereka paham bahwa dunia maya adalah ruang publik, sehingga segala tingkah lakunya selalu berdimensi etis. Ada banyak pilihan sikap dalam bermedia sosial. Mereka yang memiliki tingkat literasi tinggi akan memilih jalan konstruktif, dengan mengunggah konten-konten yang membawa manfaat bagi masyarakat, sebagaimana pilihan para jurnalis warga di Kabupaten Brebes. Tak hanya anti-hoax dan hate speech, mereka bahkan sudah menggariskan semacam standar menjadi jurnalis warga. Mereka membuat istilah "story of change": sejauh mana tulisan itu membawa perubahan yang baik dalam masyarakat.

Dalam kondisi yang memang tingkat literasinya rendah, kadang pendekatan hukum menjadi tak terelakkan. Di Indonesia, terdapat seperangkat regulasi yang membatasi orang dalam bertukar informasi, misalnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika melihat maraknya pesan kebencian di Indonesia, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan edaran khusus yang memberi ancaman terhadap pelaku penyebar kebencian. Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 itu disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa "ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Aspek regulasi memang diperlukan, tetapi tak akan pernah cukup untuk mengendalikan disinformasi dan pesan kebencian. Sanksi

hukum lebih berfokus pada wilayah hulu, yakni mereka yang memproduksi pesan kebencian. Dalam logika 'supply and demand', para produsen hoaks dan pesan kebencian itu eksis karena banyak yang menikmatinya. Karena itu, dalam jangka panjang, strategi kultural, dengan terus meningkatkan literasi media, akan lebih menjanjikan.

### Daftar Pustaka

- Atton C and Hamilton JF.2008. *Alternative Journalism*. London: Sage.
- Chung, Deborah S & Nah, Seungahn. 2017. Conceptualizing citizen journalism: US news editors' views. *Journalism* 18 (1): 1-19
- Deacon, Liam. 2015. Massive Increase In Arrests For 'Hate Speech' On Social Media, diakses pada 6/11/2016 di <http://www.breitbart.com/london/2016/06/04/massive-increase-in-arrests-for-hate-speech-on-social-media/>
- Forde S .2009. What's so alternative about 'alternative' journalism? Journalism education in the digital age: Sharing strategies and experiences. *Paper presented at the JEA conference, Perth, WA, 30 November–2 December.*
- Jurrat N. 2011. *Mapping Digital Media: Citizen Journalism and the Internet*. London: Open Society Foundations.
- Kovach, Bill & Rosentiel, Tom. 2010. *Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload*. New York: Bloomsbury
- Mody, Bella. 2011. Student Civic Engagement with Humanitarian Disasters: Collaborative Cross-National Research on Darfur Reporting. *Journal of African Media Studies* 3 (3): 349-366.
- Nah, Seungahn. et.al. 2017. Citizen journalism practice increases civic participation. *Newspaper Research Journal* 38(1): 62–78
- Nip JYM. 2006. Exploring the second phase of public journalism. *Journalism Studies* 7(2):212–236.
- Rodríguez C, Ferron B and Shamas K. 2014. Four challenges in the field of alternative, radical and citizens' media research. *Media, Culture & Society* 36(2): 150–166.
- Rutigliano L.2007. Emergent communication networks as civic journalism. In: Tremayne M(ed.) *Blogging, Citizenship, and the*

*Future of Media*. London: Routledge  
Ryfe DM and Mensing D. 2010. Citizen journalism in a historical frame.  
In: Rosenberry J and St. John B III (eds) *Public Journalism 2.0:  
The Promise and Reality of a Citizen-Engaged Press*. New  
York: Taylor & Francis

